

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara mempunyai sistem pemerintahannya masing-masing. Sistem pemerintahan terdiri dari banyak komponen yang berbeda-beda, yang masing-masing komponen berbeda-beda menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi pengaturan yang lengkap. Secara umum sistem pemerintahan suatu negara memiliki sistem yang terdefinisi dengan baik dan tujuan utamanya adalah untuk melindungi stabilitas negara yang bersangkutan. Stabilitas suatu negara dapat dinilai dari ekonomi, politik, situasi pertahanan dll. Orang Indonesia suka negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial juga berlaku menstabilkan negara adalah tujuan utama. Penyelenggara pemerintahan Indonesia sendiri terbagi menjadi dua yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan lokal. (Simatupang, 2020)

Penyelenggara pemerintah Indonesia adalah pemerintahan yang baik pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak terlepas dari Sistem Akuntansi. Sistem Akuntansi adalah pengorganisasian formulir, catatan, dan laporan mengkoordinasikan penyediaan informasi pengelola keuangan diperlukan untuk manajemen bisnis. Sistem Akuntansi yang baik membuat segalanya lebih mudah orientasi berbasis informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

Di Daerah Otonom mempunyai hak mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan kehendak rakyat sesuai undang-undang menerapkan. Oleh karena itu daerah mendapat manfaat dari sumber daya keuangan untuk dapat membiayai pembangunan dan pengelolaan pemerintahan. Kemampuan moneter wilayah tersebut harus terlihat dari kemampuan melacak sumbernya memiliki aset moneter, mengawasi dan memanfaatkannya dananya sendiri cukup untuk mendukung undang-undang tidak resmi sehingga ketergantungan pada pemerintah fokus dapat dikurangi.. (Wardani, 2010).

Tugas provinsi merupakan tol teritorial sebagai angsuran bagi pemerintah kebobolan izin tertentu secara eksplisit diberikan dan juga diakui oleh pemerintah terdekat untuk membantu orang atau zat swasta. Pembalasan dendam Lokal adalah komponen penting dalam bantuan bayaran unik lokal karena mampu memberikan kontribusi yang memadai luar biasa bagi keselarasan Pemerintah Provinsi. Demonstrasi tahun ini 1997 tentang Retribusi Provinsi sebagaimana disegarkan pada Peraturan Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Tidak Resmi Nomor 66 Tahun 2001 tentang Tol Provinsi, dinyatakan bahwa Bea Cukai Lokal dapat dikumpulkan menjadi tiga bagian, khususnya Pembalasan Administrasi Tugas Administrasi Umum, Administrasi Niaga, dan Pengaturan Tertentu. (Bappeda DKI Jakarta, 2023).

Tuntutan bantuan publik adalah tuntutan terhadap pemerintahan yang diberikan atau diberikan oleh badan legislatif setempat demi

kepentingan atau keuntungan publik, dan juga dapat dinikmati oleh masyarakat atau unsur-unsur. Contoh tuntutan bantuan masyarakat antara lain administrasi kesejahteraan ekologis, misalnya kebersihan dan tol sampah, tuntutan kartu identitas penghuni dan akta wajib militer umum, tugas administrasi pasar, tuntutan interniran atau pembakaran, tuntutan meninggalkan jalan umum, tuntutan pengujian kendaraan bermotor, instruksional tuntutan bantuan.

Tuntutan administrasi bisnis adalah tuntutan terhadap layanan yang diberikan atau disediakan oleh badan legislatif setempat mengenai standar bisnis. Hal ini termasuk pemanfaatan kekayaan wilayah yang belum ditemukan dan juga keuntungan dari administrasi yang dikelola oleh negara setempat sehingga masyarakat miskin telah diberikan secara memadai oleh wilayah rahasia tersebut. Contoh tuntutan administrasi bisnis meliputi penggunaan sumber daya provinsi, tuntutan pasar toko atau diskon, tuntutan lokasi obral barang dagangan, bea masuk terminal kendaraan umum, tuntutan meninggalkan daerah, tuntutan tempat tinggal, tuntutan tempat hiburan olahraga.

Tuntutan perizinan tertentu adalah tuntutan terhadap administrasi pemberi izin tertentu dari negara bagian terdekat kepada orang atau zat yang sepenuhnya bermaksud mengarahkan dan mengatur kegiatan penggunaan ruang, pemanfaatan aset normal, serta kantor tertentu. Contoh tuntutan otorisasi tertentu termasuk tuntutan izin pembangunan gedung,

tuntutan hibah tempat untuk menjual koktail, tuntutan hibah gangguan, tuntutan izin kursus, dan tuntutan izin penangkapan ikan. (Sandy, 2019)

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan sebagai unit pelaksana memperoleh pendapatan retribusi berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa yang berasal dari penerimaan retribusi pasar, penerimaan parkir, retribusi mandi cuci kakus dan air bersih,(MCK), penerimaan pedagang kaki lima (PK5), penerimaan sewa kios luar pasar (SKLP). Kelimanya saling berkaitan dalam penerimaan retribusi daerah. Anggaran tersebut diterima oleh Bendahara Penerimaan retribusi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan yang kemudian diserahkan ke Kas Daerah

Kerangka kerja bermacam-macam tugas yang memadai dan kuat dapat memberikan koherensi dan keberhasilan pada kantor. Salah satu kerangka untuk mendapatkan pembalasan datang dari pedagang kaki lima (PK5). Pertukaran merupakan salah satu bagian dari kehidupan datar yang dengan sendirinya dapat berarti cinta dalam arti memberi. Salah satu pedagang yang ada saat ini, yaitu pedagang kaki lima (PK5), adalah siapa saja yang menyelesaikan kegiatan usaha, administrasi, pada umumnya akan beraktivitas dengan kemampuan keuangan yang terbatas dan berada di tempat terbuka tanpa keaslian pasar yang sebenarnya. Pasar merupakan industri sosial dan merupakan instrumen perbaikan yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan riil pasar organik.

Para pedagang kaki lima yang hadir di pasar tersebut banyak bercerita mengenai apa saja yang perlu diketahui oleh para pedagang kaki lima untuk bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama dalam berdagang, terutama untuk sementara waktu dan mengenai barang untuk diperdagangkan, modal, alat kerja, tempat atau posisi mereka. akan memanfaatkan. lebih baik dari para pedagang di sekitarnya. Ada pula yang mengatakan bahwa jumlah modal yang digunakan hanya wajar, serta menjual terlalu sedikit barang dagangan dan terlalu standar bagi para pelaku usaha lainnya.

Broker lain juga mengatakan bahwa posisi dapat menentukan apakah bisnis mereka akan berjalan dengan baik, mereka mengatakan bahwa mereka berharap untuk menemukan tempat yang lebih baik untuk berdagang dibandingkan dengan dealer yang sudah ada, misalnya masyarakat yang saat ini menggunakan stand, booth atau toko. Bahkan ada pedagang kaki lima yang mengatakan bahwa jika mereka ingin mencari kawasan bisnis sejauh mungkin, mereka harus berusaha bersaing dengan lawan di kota metropolitan. Dealer lain mengatakan bahwa sistem bisnisnya untuk menjaga produknya adalah dengan melihat situasi ekonomi (sesekali), seperti fokus pada kualitas pembeli atau tamu pasar, dan menjual jenis produk yang tidak sulit dijual (sesuai kondisi modal) . dengan banyaknya pedagang yang berjualan, hal ini akan memberikan penghasilan tambahan dari permintaan. Salah satu jenis biaya yang diterima dealer adalah pembersihan uang tunai, sewa dan keamanan.

Setiap dealer kemungkinan akan menuntut secara konsisten karena broker telah memanfaatkan kantor yang diberikan oleh otoritas publik.

Perkembangan sistem penerimaan retribusi pedagang kaki lima di Dinas Penukaran Barang dan UKM Kota Pekalongan dimulai dari petugas pengumpulan yang mengumpulkan tarif bea, kemudian menyimpannya ke petugas. Sejak saat itu, pendapatan masuk ke pemodal dan dari pemodal pendapatan disimpan di penyimpanan provinsi. Kerangka balas dendam pedagang kaki lima di Balai Pertukaran UKM Kota Pekalongan mengalami masa-masa yang menjanjikan dan kurang menjanjikan karena rendahnya kesadaran akan adanya pembalasan wajib bagi para pedagang kaki lima.

Berdasarkan Laporan Pengakuan Gaji Kota Pekalongan dari Dinas Pertukaran UKM dan Bantuan Kota Pekalongan, maka besaran gaji dari tuntutan pedagang kaki lima pada bulan Januari-Desember adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Pendapatan Kota Pekalongan

Bulan	Pendapatan Retribusi PK 5 tahun 2022
Januari	Rp. 12.949.500
Februari	Rp. 8.147.000
Maret	Rp. 13.322.000
April	Rp. 67.737.000
Mei	Rp. 10.189.000

Juni	Rp. 14.830.125
Juli	Rp. 14.567.000
Agustus	Rp. 24.084.800
September	Rp. 17.166.000
Oktober	Rp. 15.743.125
November	Rp. 14.361.000
Desember	Rp. 14.284.050

(Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan retribusi pedagang kaki lima mengalami fluktuasi pada bulan April terjadi kenaikan yang sangat tinggi dan terdapat penurunan berkala pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Hal tersebut perlu dilakukan penelitian agar dapat diketahui penyebab dari kenaikan yang tinggi dan penurunan secara berkala. Hasil dari penelitian tersebut selanjutnya dapat dianalisis sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk meningkatkan pendapatan retribusi daerah pedagang kaki lima. Menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan untuk tarif retribusi pedagang kaki lima yaitu Rp. 250 per m²/ hari untuk pedagang di shelter sedangkan untuk tarif Rp. 55.000 per m²/ bulan untuk perdagangan lokasi strategis, luas antara 5 m² – 39 m² sedangkan tarif Rp. 20.000 per m²/ bulan untuk perdagangan lokasi bukan strategis, luas antara 5 m² – 21 m².

1.2 Perumusan Masalah

Mengingat landasan di atas, maka rincian permasalahan yang diambil oleh penulis adalah:

1. Bagaimana Sistem Penerimaan Retribusi Pedagang Kaki Lima pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan?
2. Kendala dan upaya apa saja yang terjadi pada Sistem Penerimaan Retribusi Pedagang Kaki Lima pada Dinas perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan penyusunan tugas akhir ini antara lain

1. Untuk mengetahui sistem penerimaan retribusi pedagang kaki lima pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan?
2. Untuk mengetahui kendala - kendala apa saja yang terjadi sistem penerimaan retribusi pedagang kaki lima pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan?

1.4 Kegunaan Tugas Akhir

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi Tugas Akhir (TA) sebagai persyaratan kelulusan Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan penulis dalam mengimplementasikan akuntansi pada instansi pemerintahan khususnya sistem penerimaan retribusi.

2. Bagi Instansi Pemerintahan

Seperti kontribusi dan evaluasi serta materi pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sistem penerimaan retribusi pedagang.

3. Bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Sebagai informasi bagi penulis lainnya yang akan melakukan penelitian tentang sistem penerimaan retribusi dan sebagai tambahan literatur pada kampus serta meningkatkan kualitas lulusan mahasiswa Diploma III Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

1.5 Metode Tugas Akhir

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

1. Lokasi Penelitian

Tempat Penulis melakukan penelitian yaitu di Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan yang beralamatkan Jalan Majapahit No.9 Kota Pekalongan.

2. Jenis Data

Informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah sebagai persepsi terhadap objek eksplorasi (revenge income framework) secara langsung dan dengan melakukan entry level

position pada dinas terkait sehingga dapat langsung melakukan survey pelatihan.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis memerlukan data-data sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang berasal dari narasumber langsung atau perusahaan dalam bentuk wawancara kepada orang-orang yang bersangkutan serta dokumen-dokumen yang diperlukan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal internet sebagai referensi maupun kajian pustaka.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun guna memberikan suatu gambaran tentang penelitian ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan tugas akhir, kegunaan tugas akhir, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini dibahas mengenai teori-teori yang relevan dan dapat mendukung penelitian yang dilakukan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Gambaran umum penelitian berisi tentang informasi dari objek penelitian. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan gambaran

mengenai objek penelitian penulisan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian.

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN

Pada bagian ini hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, serta berisi saran yang diberikan penulis.

